NOTA DINAS

NOMOR [[@NomorND]](%5b@NomorND%5d)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yth | : | Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Ternate |
| Dari | : |  |
| Sifat | : | [Biasa](%5b@SifatNd%5d) |
| Lampiran | : |  |
| Hal | : |  |
| Tanggal | : | [[@TanggalND]](%5b@TanggalND%5d) |
|  |  |  |

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Nomor ${nomorSurat} tanggal ${tanggalSurat} hal ${hal}, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana Bapak maklum, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara melalui nota dinasnya menyampaikan permintaan penilaian Barang Milik Negara pada Satuan Kerja ${pemohon} guna memperoleh nilai wajar terkini dalam rangka pemindahtanganan (penjualan).
2. Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan penilaian dalam rangka Pemindahtanganan, dokumen permohonan telah memadai. Dan guna memperoleh nilai wajar terkini yang akuntabel, perlu kiranya terlebih dahulu dilakukan survei lapangan dengan peninjauan langsung oleh Penilai Pemerintah pada KPKNL Ternate.
3. Lokasi objek penilaian berada di ${lokasi} yang menurut kami dapat ditempuh menggunakan transportasi umum dengan menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah.
4. Berkaitan hal-hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa permohonan penilaian dimaksud dapat ditindaklanjuti, dan pelaksanaan survei lapangan dalam rangka penilaian akan dilaksanakan pada ${tanggalSurvei} yang berlokasi di ${lokasi} yang akan dilaksanakan oleh:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama/NIP | Pangkat / Golongan | Jabatan |
| ${nomor} | ${anggotaTim} / ${NIP} |  |  |

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan DJKN, guna memberikan batasan dan lingkup penugasan/permohonan penilaian yang akan dilaksanakan, maka perlu kiranya penugasan ini dikukuhkan pula dalam sebuah naskah Surat Keputusan Kepala KPKNL Ternate.
2. Selanjutnya, apabila Bapak tidak berpendapat lain mohon kiranya untuk mendisposisikan nota dinas ini kepada Kepala Sub Bagian Umum untuk penyusunan konsep Surat Keputusan sekaligus Surat Tugas untuk pelaksanaan penilaian dimaksud. Adapun segala biaya yang timbul akibat kegiatan penilaian ini dibebankan pada DIPA KPKNL Ternate.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditandatangani secara elektronik |
|  |  |

|  |
| --- |
| Tembusan: |
| Kepala Subbagian Umum |